**PELAKSANAAN PERJANJIAN POLA KREDIT KOPERASI PRIMER ANGGOTA (KKPA)
DI PT. KTU ASTRA YANG DIKELOLA OLEH KOPERASI RIMBA MUTIARA**

**Oleh : Yudhi Fasrah Ilahi
Pembimbing I : Dr.Firdaus, S.H.,M.H
Pembimbing II : Riska Fitriani, SH., MH.
Alamat: Jalan Kopan, Pekanbaru-Riau
Email : yudifasrah25@gmail.com / Telepon : 0853 6331 5778**

ABSTRACT

The agreement is a legal relationship regarding property between two parties, in which one party promises or is considered promising to do something or not. The main issues discussed in this paper are regarding agreements or provisions made by cooperatives in RAT number 15 / KOP-RM / TR / X / 11 deciding in the second part namely To Participant Farmers who have been determined, Prohibited from Selling Buy Palm Oil Plantation Land (KKPA). Violated or Not implemented by members of the pearl jungle cooperative in Siak district, Koto Gasip district.

The research method used is empirical research, another term used is Sociological legal research also called field research and this research is descriptive. In data collection, the types of data used in this study are primary data and secondary data, namely directly through respondents (field), Law Number 18 Year 2004 concerning Plantation, Civil Code, legal journals and books - books related to research. Analysis of this data is done qualitatively and deductively drawn conclusions.

From the results of research conducted by the author, it was found that there were still farmers who were members of the KKPA who sold their oil palm plantation to other parties. So that the regulation Number: 15 / KOP-RM / TR // 11 in deciding sets out the second part: "to the participating farmers who have been determined, it is prohibited to trade in the palm oil." Not applicable.

So that based on this matter, strict sanctions are needed, be it administrative sanctions or criminal sanctions for parties to carry out the buying and selling process so that regulations made by cooperatives can be enforced.

Keywords : Agreement, cooperatives and farmers of KKPA members

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang yang sebagian masyarakatnya adalah petani, tanah masih merupakan masalah yang peka di dalam masyarakat, hal ini disebabkan oleh kepemilikan tanah yang tidak merata, karena ada yang memiliki tanah luas, ada juga yang memiliki tanah yang sempit bahkan ada yang sama sekali tidak memilikinya. Pemilikan tanah seharusnya dilakukan dengan tertib dan teratur, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang berkaitan dengan masalah pemilikan tanah yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya ditulis UUPA). Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960.¹

UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Dasar Pokok-Pokok Agraria diberlakukan di seluruh wilayah Indonesia sebagai hukum tanah Nasional Indonesia, maka adanya interaksi yang terjadi antara penanaman modal dengan masyarakat (manusia satu dengan lainnya) tentu akan menimbulkan beberapa akibat diantara mereka antara lain adalah akibat hukum, demi melindungi kepentingannya itu maka perlu adanya suatu kesepakatan yang bertujuan untuk mengatur interaksi tersebut dengan segala akibat hukum yang akan ditimbulkan dalam suatu perjanjian.

Perjanjian atau persetujuan menurut beberapa ahli adalah: Subekti, mengatakan "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal".²

Koperasi rimba mutiara dalam melaksanakan usahanya yang dikelolaknya, sesuai dengan keputusan bersama menteri pertanian, menteri koperasi dan PPK nomor 73.Kpts/KB.510/1998 dan 01/SKB/M/II/1998 tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa dibidang usaha perkebunan dengan pola

kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya.³

Perseroan adalah apabila beberapa orang bersama-sama mempunyai suatu tujuan yang sama yang hendak dicapai, maka ada dua kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut, pertama, mereka melakukan kerja sama semata-mata timbal balik saling mengikat, kedua, terjadi suatu kesatuan yang didalamnya hubungan diantara mereka terhadap pihak ketiga bukan merupakan tindakan masing-masing, melainkan tindakan dari kumpulan/ kesatuan, sedangkan hubungan diantara mereka bukan saja hubungan satu terhadap yang lain, melainkan juga merupakan hubungan terhadap keseluruhannya/ kesatuannya.⁴

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha perkebunan yang produktif. Sehingga, tujuan dari pembangunan perkebunan tersebut demi kemakmuran rakyat dapat tercapai⁵

KKPA pada perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan dan perjanjian kredit KKPA antara petani anggota KUD rimba mutiara dengan KUD rimba mutiara adalah fasilitas pendanaan yang disediakan oleh pemerintah melalui Bank BRI cabang Koto Gasip Perawang sebagai payalur kredit KKPA tersebut kepada KUD rimba mutiara, untuk diteruskan kepada PT.KTU ASTRA, guna pembiayaan pembangunan, pandangan Kritis terhadap KKPA di perkebunan kelapa sawit yang meliputi *land*

³ keputusan koperasi rimba mutiara nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 tentang penetapan nama-nama petani peserta KKPA MENGUATKAN tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa dibidang usaha perkebunan dengan pola kemitraan melalui pemanfaatan kredit kepada koperasi primer untuk anggotanya.

⁴ Herlin Budiono, "Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan". Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang – Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasimanasia Ri, Vol.6 no.2-juni 2009.

⁵ Pasal 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa tujuan dari penyelenggaraan perkebunan yaitu, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan negara, meningkatkan penerimaan devisa negara, menyediakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing, memenuhi kebutuhankonsumsi dan bahan baku industry dalam negeri, dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

¹ Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1984), hlm. 1.

cleqring, pembibitan dan pemeliharannya hingga tanaman menghasilkan. Setelah terjadinya Krisis Keuangan Global (Krisis), perubahan besar pada peraturan industri perbankan diperkenalkan untuk mendorong stabilitas dan mencegah meluasnya biaya yang terkait dengan keruntuhannya.⁶

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 4378) dan ketetapan yang ditetapkan didalam rapat anggaran tahunan (RAT), mulai dari keanggotaan petani pada KUD Rimba Mutiara, lalu permohonan kredit koperasi primer anggota (KKPA) kepada Bank BRI cabang Koto Gasip Perawang. Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan bagian dari tatanan ekonomi yang akhir-akhir ini telah menarik perhatian para ahli hukum dan masyarakat. Kebiasaan ini tertarik pada cara kekuatan sosial, budaya dan ekonomi.⁷ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan Pasal 1 angka (1) lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.⁸

Koperasi Rimba Mutiara atas kuasa dari petani anggota kemudian dana POLA KKPA yang telah dicairkan tersebut akan diserahkan KUD Rimba Mutiara kepada perusahaan inti untuk dijadikan modal dalam pembangunan kebun kelapa sawit di atas lahan milik petani anggota KUD Mitra.

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian dalam penulisan ini adalah sanksi dalam perjanjian pola kredit koperasi primer anggota

tidak adanya sanksi dalam perjanjian pola KKPA, sehingga mengakibatkan banyaknya anggota yang melanggar peraturan koperasi, berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dilapangan lebih kurang 120 anggota KUD rimba mutiara yang telah menjual kebun kelapa sawit POLA KKPA miliknya kepada pihak lain, akan tetapi dalam perjanjian yang telah disepakati dan ditetapkan didalam rapat anggaran tahunan (RAT) Nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 memutuskan dalam bagian kedua yaitu kepada petani peserta yang telah ditetapkan, dilarang memperjual belikan lahan kebun kelapa sawit (KKPA). Sehingga muncullah suatu masalah dikarenakan banyaknya anggota yang menjual lahan miliknya kepada pihak lain, baik sepengetahuan koperasi atau pun tanpa diketahui oleh koperasi sama sekali.

Wanprestasi yang dilakukan oleh anggota koperasi rimba mutiara yaitu bapak syamsir yang bertentangan dengan kesepakatan yang disebutkan dalam RAT nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 bahwa Kepada Petani Peserta Yang Telah Ditetapkan, dilarang Memperjual Belikan Lahan Kebun Kelapa Sawit (KKPA) tindakan yang dapat diambil oleh pihak koperasi sebagai perpanjangan tangan dari PT. KTU ASTRA Hanya dapat menjadi penyelenggara dan membahas didalam RAT mengenai masalah – masalah yang terdapat didalam pola KKPA tersebut dan adapun permasalahan yang penulis bahas masih ditahap musyawarah dimana para pihak dipanggil untuk mendapatkan kesepakatan dimana musyawarah dipimpin oleh pimpinan PT. KTU ASTRA

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini dengan mengangkat judul **Pelaksanaan Perjanjian Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (Kkpa) Di PT. Ktu Astra Yang Dikelola Oleh Koperasi Rimba Mutiara.**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dalam latar belakang permasalahan maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak?

⁶ Thomson Reuters Canada Limited.; Michael, *Banking & Finance Law Review* July, 2016 Article Michael Marina1 Copyright © 2016 by Marin jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originating Doc, pada tanggal 24 Agustus 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.>

⁷ See, e.g., Timothy W. Guinnaine, *A Failed Institutional Transplant: Raiffeisen's Credit Cooperatives in Ireland, 1894-1914*, 31 *EXPLORATIONS ECON. HIS.* 38 (1994) (describing the failed transplant of German credit cooperatives in Ireland). jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP+I+A+REF&originating Doc, pada tanggal 2 februari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.>

⁸ Riska Fitriani, "Praktek Klausula Baku Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dikota Pekan Baru". *Jurnal DINAMIKA & PROBLEMATIKA HUKUM*, vol.1 no.1-Desember 2013, Hal 113

2. Bagaimana upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui mekanisme dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak.
- b. Untuk mengetahui upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan berguna antara lain :

- a. Bagi penulis dan penulis selanjutnya.

Hasil penelitian ini sebagai wawasan bagi penulis serta sebagai salah satu tugas akhir bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau untuk meraih gelar strata 1; Sebagai bahan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama serta untuk menambah referensi keputusan bagi pembaca.

D. Kerangka Teori

Soerjono Soekanto mengartikan kerangka teori sebagai suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. Teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perjanjian kredit

Pengertian perjanjian menurut para ahli Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal di lingkungan lapangan harta kekayaan.

Perjanjian kredit KKPA yang dibuat oleh koperasi rimba mutiara

dimana koperasi sebagai penyalur dana kredit yang diberikan oleh bank BRI akan diteruskan kepada anggota yaitu sipenerima kredit guna untuk pembangunan kebun kelapa sawit agar lebih produktif, dan sebagai jaminannya adalah kebun milik petani anggota KKPA kemudian anggota koperasi memberikan kepercayaan kepada koperasi sebagai penyalur dana KKPA dan sebagai pengelola dana hasil panen milik petani anggota, dimana hasil panen milik petani tersebut akan dijadikan untuk melunasi hutang petani anggota KKPA.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.⁹

2. Tujuan Kredit

Menurut Kasmir suatu fasilitas kredit memiliki tujuan. Adapun tujuan kredit tersebut antara lain :

- a. Mencari Keuntungan Hasil keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank BRI sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada Anggota koperasi. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.
- b. Membantu usaha nasabah Yaitu membantu anggota koperasi yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal pembangunan kebun kelapa sawit agar lebih produktif. Dengan dana tersebut, maka anggota koperasi akan dapat mengembangkan lahan perkebunan KKPA tersebut.

3. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir selain memiliki tujuan pemberian, suatu fasilitas kredit

⁹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 85

juga memiliki beberapa fungsi, antara lain :

a. Untuk meningkatkan daya guna uang
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

c. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh pihak bank akan dapat digunakan oleh anggota koperasi untuk mengolah kebun kelapa sawit KKPA agar lebih produktif

d. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

e. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian kredit dapat pula membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.

2. Teori Perbuatan Melawan Hukum

Rumusan perbuatan melawan hukum terdapat pada Pasal 1365 KUH Perdata, hukum tertulis dan hukum tidak

tertulis, kewajiban hukum serta kepatutan pada prinsipnya, tujuan dibentuknya sistem hukum yang kemudian dikenal Perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) diatur dalam Buku III Sebelum tahun 1919 yang dimaksud perbuatan melawan hukum adalah perbuatan secara jujur, tidak merugikan orang lain dan memberikan orang lain haknya. Wanprestasi kontrak. Kata (*tort*) berasal dari bahasa latin (*orquer*) atau (*tortus*) yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

Jika ditinjau dari pengaturan KUHPPerdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPPerdata di negara sistem Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut :¹⁰

a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPPerdata.

b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1366 KUHPPerdata.

c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1367 KUHPPerdata

Berdasarkan rumusan masalah tersebut penulis menyimpulkan adanya salah satu peraturan atau ketentuan yang dilanggar dalam penulisan yang sedang penulis teliti dan salah satu peraturan atau ketentuan yang dilanggar adalah RAT nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 bahwa Kepada Petani Peserta Yang Telah Ditetapkan, dilarang Memperjual Belikan Lahan Kebun Kelapa Sawit(KKPA), namun petani peserta koperasi yang tergabung dalam keanggotaan koperasi melanggar RAT yang telah disepakati.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Dari penelitian proposal ini yang berjudul “ Pelaksanaan Perjanjian Pola Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) Di Pt. Ktu

¹⁰ *Ibid*, hlm, 3.

Astra Yang Dikelolah Oleh Koperasi Rimba Mutiara Tahun 2015”.

1. KKPA adalah singkatan dari Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya.¹¹
2. koperasi primer, yakni koperasi yang beranggotakan orang seorang, bukan koperasi sekunder. Dalam program KKPA, koperasi dapat berperan sebagai pelaksana pemberi KKPA (*executing agent*) atau sebagai penyalur (*challenging agent*)¹²
3. Penyelesaian adalah proses atau cara perbuatan menyelesaikan¹³
4. Kemitraan adalah Kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan yang berkelanjutan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.¹⁴
5. Pola inti plasma adalah merupakan suatu hubungan kerja sama timbal balik yang saling menguntungkan¹⁵.
6. Perjanjian adalah Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”¹⁶.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti agar memperoleh hasil sebagaimana yang diharapkan, maka penulis mempergunakan penelitian sebagaimana berikut :

¹¹ Tujuan dan sasaran KKPA dalam Pasal 2 dan 3 Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/KPTS.OT 210/98 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Koperasi Unit Desa Di Bidang Usaha Perkebunan Dengan Pola Kemitraan Melalui Pemanfaatan Kredit Kepada Koperasi Primer Untuk Anggotanya

¹² Pasal 6 Keputusan Bersama Menteri Pertanian Dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 73/KPTS.OT 210/98

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.1252

¹⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 Ayat 8.

¹⁵ Lala M. Kolopaking, “Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem”, (Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan, Jakarta, 2002), hlm. 241

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1994), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian sosiologis dimana pada penelitian hukum sosiologis dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektifitas hukum atau peraturan hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah di Koperasi Rimba Mutiara (Kecamatan Koto Gasib, Kabupaten Siak) penulis mengambil lokasi penelitian ini dikarenakan penulis ingin mengetahui kendala POLA KKPA di Koperasi Rimba Mutiara dalam proses pola KKPA. Serta penulis juga ingin mengetahui solusi atau upaya yang dapat dilakukan oleh koperasi dalam perlindungan terhadap anggota koperasi.

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁷ Adapun yang dijadikan populasi dalam sampel ini adalah Koperasi Rimba Mutiara.

b. Sampel

Sampel menurut Arikunto bagian dari populasi atau sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹⁸ Karena jumlah populasi yang terlalu banyak, maka penulis menggunakan metode purposive sampling yaitu teknik sampling yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya. Yang mana tujuannya adalah masalah efisiensi waktu penelitian. Dalam penetapan sampel, penulis menggunakan metode purposive yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili sejumlah populasi yang ada.

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Gajah Mada University Press: Jakarta, 2009), Hal.38.

¹⁸ Akdon, *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian*, (Dewa Ruchi: Bandung, 2005), Hlm. 98.

4. Sumber data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi:

- a. Data primer, yaitu data yang penulis peroleh langsung dari responden dengan pengumpulan data dan mempergunakan wawancara, wawancara tersebut penulis ajukan kepada Ketua Koperasi Rimba Mutiara, staf Koperasi Rimba Mutiara, Anggota Koperasi Rimba Mutiara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang Bahan Hukum Primer yaitu undang-undang yang berhubungan dengan penelitian antara lain
 - 1) Undang-undang nomor Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
 - 2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan
 - a) **Bahan Hukum sekunder** yaitu buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti;
 - b) **Bahan Hukum Tertier** yaitu bahan hukum yang menggunakan kamus atau ensiklopedi. Dalam Penelitian ini Menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data dengan cara:

- a. Kuisisioner, yaitu metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti, yang pada umumnya dalam daftar pertanyaan itu telah disediakan jawaban-jawabannya.
- b. Kajian kepustakaan yakni merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.
- c. Analisis data yakni dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah

analisis kualitatif yaitu data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Selanjutnya, penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang jugak merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.

6. Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan baik berupa wawancara dan observasi akan dikelola dengan mengelompokkan dan mengklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas, kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk wacana kalimat yang dapat dimengerti dan dipahami, selanjutnya penulis melakukan analisa dengan menggunakan analisa secara kualitatif yaitu suatu analisa yang dilakukan peneliti terhadap hasil data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi dengan menghubungkan kata-kata dan teori serta hasil pengamatan untuk mendapatkan kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang kredit dan proses pelaksanaan pemberian kredit

1. Pengertian Kredit

Pengertian Kredit Dalam arti luas kredit diartikan sebagai sebagai kepercayaan. Begitu pula dengan bahasa latin kredit berarti "credere" yang artinya percaya¹⁹. Maksud dari percaya bagi si pemberi kredit adalah ia percaya kepada si penerima kredit bahwa kredit yang disalurkanannya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si

¹⁹ Rimsky K. Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 163

penerima kredit merupakan penerimaan kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar sesuai dengan jangka waktu.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.²⁰ Dapat diartikan bahwa peranan bank adalah lembaga yang membantu masyarakat dalam hal permodalan atau keuangan.

2. Tujuan Kredit

Menurut Kasmir suatu fasilitas kredit memiliki tujuan. Adapun Tujuan kredit terdapat antara lain :

- a. Mencari Keuntungan yaitu Hasil yang diperoleh dalam bentuk bunga yang di terima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah. Keuntungan yang penting untuk kelangsungan bank itu sendiri, dan juga dapat membesarkan usaha bank.
- b. Membantu usaha nasabah yaitu membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk berinvestasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah yaitu semakin banyak kredit yang di salurkan oleh pihak perbankan , maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit maka akan semakin banyak kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

B. Teori Perbuatan Melawan Hukum dan Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Istilah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebelum tahun 1919

oleh Hoge Raad diartikan secara sempit, yakni tiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut ajaran yang sempit sama sekali tidak dapat dijadikan alasan untuk menuntut ganti kerugian karena suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan undang-undang sekalipun perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hal-hal yang diwajibkan oleh moral atau hal-hal yang diwajibkan dalam pergaulan masyarakat.

Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) diatur dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1380 KUHPerdata. Gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi: “setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Pasal 1365 tersebut biasanya dikaitkan dengan Pasal 1371 ayat (1) KUHPerdata yang berbunyi: “penyebab luka atau cacatnya sesuatu badan atau anggota badan dengan sengaja atau kurang hati-hati, memberikan hak kepada si korban untuk, selain penggantian biaya pemulihan, menuntut ganti kerugian yang disebabkan oleh luka cacat tersebut”.

2. Unsur-Unsur Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum Pasal 1365 dan Pasal 1370, maka dalam melakukan gugatan perbuatan melawan hukum harus dipenuhi unsur-unsur

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak

1. Mekanisme pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA

Mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti

²⁰ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 85

plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak adalah dimulai dengan keputusan koperasi rimba mutiara nomor : 15/KOP-RM/TR/X/11 tentang penetapan nama petani peserta tahap 1/2 program pengembangan kebun kelapa sawit pola kkpa antara PT. KTU ASTRA dengan koperasi rimba mutiara dikecamatan koto Gasip kabupaten Siak. Jika dikaitkan dengan teori perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Maka anggota dan pihak koperasi yang melanggar salah satu dari 3 (tiga) kategori perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
- 2) Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).
- 3) Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Jika dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 64, tambahan lembaran negara nomor 4378) dan ketetapan yang ditetapkan didalam rapat anggaran tahunan(RAT), mulai dari keanggotaan petani pada KUD Rimba Mutiara, lalu permohonan kredit koperasi primer anggota(KKPA) kepada Bank BRI cabang Koto Gasip Perawang. Bank dan lembaga keuangan lainnya merupakan bagian dari tatanan ekonomi yang akhir-akhir ini telah menarik perhatian para ahli hukum dan masyarakat, syarat keanggotaan sesuai dengan surat keputusan : nomor 572 /BH/KDK4,2/1,2/111 /2000 dalam BAB 1V Pasal 4 disebutkan syarat dapat diterima menjadi anggota koperasi Ini Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota koperasi rimba mutiara

- b. Penduduk yang mempunyai mata pencaharian
- c. Telah cukup umur untuk melakukan tindakan hukum dan mempunyai mata pencaharian
- d. Telah menyetujui isi anggaran dasar
- e. Telah membayar simpanan pokok sebagaimana diatur dalam anggaran dasar

PT.KTU ASTRA adalah salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, yang melakukan Program revitalisasi perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki Ijin Usaha Perkebunan kelapa sawit (IUP) atau/Ijin Usaha Industri. Perseroan adalah apabila beberapa orang bersama-sama mempunyai suatu tujuan yang sama yang hendak dicapai, maka ada dua kemungkinan untuk mencapai tujuan tersebut, pertama, mereka melakukan kerja sama semata-mata timbal balik saling mengikat, kedua, terjadi suatu kesatuan yang didalamnya hubungan diantara mereka terhadap pihak ketiga bukan merupakan tindakan masing-masing, melainkan tindakan dari kumpulan/ kesatuan, sedangkan hubungan diantara mereka bukan saja hubungan satu terhadap yang lain, melainkan juga merupakan hubungan terhadap keseluruhannya/ kesatuannya.²²

Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) adalah fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada koperasi primer untuk diteruskan kepada anggota-anggotanya guna membiayai usaha perkebunan yang produktif. Sehingga, tujuan dari pembangunan perkebunan tersebut demi kemakmuran rakyat dapat tercapai KKPA pada perjanjian pembangunan kebun kelapa sawit pola kemitraan dan perjanjian kredit KKPA antara petani anggota KUD rimba mutiara dengan KUD rimba mutiara adalah fasilitas pendanaan yang disediakan oleh pemerintah melalui Bank BRI cabang Koto Gasip Perawang sebagai payalur kredit KKPA tersebut kepada KUD rimba mutiara, untuk diteruskan kepada PT.KTU ASTRA, guna pembiayaan pembangunan, pandangan Kritis terhadap KKPA di perkebunan kelapa sawit yang meliputi *land cleqring*, pembibitan dan

²¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 3.

²² Herlin Budiono, "Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan".Jurnal Legislasi Indonesia,Direktorat Jendral Peraturan Perundang – Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasimanusia Ri, Vol.6 no.2-juni 2009.

pemeliharaannya hingga tanaman menghasilkan.

Kredit koperasi primer anggota (KKPA) yang dikelola oleh koperasi rimba mutiara menimbulkan adanya dampak yang menyebabkan adanya sesuatu hambatan dalam perjanjian ini adalah adanya suatu peraturan yang dilanggar oleh anggota dalam (RAT) nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 memutuskan dalam bagian kedua yaitu Kepada Petani Peserta Yang Telah Ditetapkan, Dilarang Memperjual Belikan Lahan Kebun Kelapa Sawit(KKPA).²³ Yang mana dalam prosesnya dilakukan yaitu jual beli lahan kkpa milik anggota yaitu bapak syamsir yang dijual kepada ibuk alismar namun pihak koperasi memperbolehkan jual beli tersebut.

Namun anggota koperasi rimba mutiara ada yang menjual kebun kelapa sawit kkpa kepada pihak lain tersebut menjadi salah satu contoh kasus adanya anggota yang menjual lahan kebun kelapa sawit kkpa miliknya kepada pihak lain yaitu bapak syamsir yang menjual lahan kkpa miliknya kepada ibuk alismar. Berdasarkan pernyataan anggota yang menjual lahan kkpa miliknya yaitu bapak syamsir yang menjual lahan kebun sawit kkpa kepada ibuk alismar mengatakan bahwa alasan beliau menjual lahan kebun kelapa sawit kkpa tersebut dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang meningkat sehingga bapak syamsir menjual perkebunan kelapa sawit kkpa miliknya kepada ibuk alismar.²⁴

2. Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA

Hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja samanya bertentangan dengan peraturan koperasi yang mana berdasarkan (RAT) nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 memutuskan dalam bagian kedua yaitu Kepada Petani Peserta Yang Telah Ditetapkan, Dilarang Memperjual Belikan Lahan Kebun Kelapa Sawit(KKPA), namun berdasarkan desakan ekonomi membuat

anggota memilih untuk menjual lahan kkpa miliknya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan ibuk Alismar beliau menuturkan bahwa beliau membeli kebun kelapa sawit KKPA milik Bapak Syamsir dengan Nomor Anggotanya TR.11.00634 Tempat Tanggal Lahir Sungai Mempura,03-07-1961 Beralamat Di Koto Gasip, yang mana Bapak Syamsir menjual kebun kelapa sawit KKPA miliknya kepada Ibu Alismar pada tanggal 28 Desember 2016.alasan bapak syamsir kepada ibuk alismar menjual kebun sawit kkpa miliknya dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang meningkat dan biaya pengobatan anaknya dirumah sakit sehingga bapak syamsir menjual perkebunan kelapa sawit kkpa miliknya .²⁵

Berdasarkan jual beli yang dilakukan oleh bapak syamsir dan ibuk alismar tentu menimbulkan suatu permasalahan yaitu jual beli yang dilakukan bertentangan dengan peraturan yang telah disepakati oleh anggota yaitu dalam (RAT) nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 memutuskan dalam bagian kedua yaitu Kepada Petani Peserta Yang Telah Ditetapkan, Dilarang Memperjual Belikan Lahan Kebun Kelapa Sawit(KKPA).

Perjanjian yang terjadi antara bapak syamsir dan ibuk alismar perjanjiannya sah dikarenakan melengkapi unsur-unsur atau ketentuan dari koperasi, meski perjanjian yang dilakukan tersebut melanggar peraturan RAT namun pihak koperasi memperbolehkan. Mengenai sanksi jika tanpa sepengetahuan koperasi jual beli tersebut dilakukan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan dan hak-hak keanggotaannya dapat dicabut oleh pihak koperasi.

3. Keabsahan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA

Dalam hal subjek dalam pola kkpa ini yang dijadikan subjeknya adalah perjanjian yang dilakukan oleh anggota dengan pihak koperasi

a. Secara detail jenis-jenis subjek hukum

1) Manusia Biasa

Manusia biasa (natuurlijke persoon) manusia sebagai subyek hukum telah

²³ Nama-nama petani anggota koperasi rimba mutiara desa teluk rimba kecamatan koto gasip kabupaten siak Nomor: 572/BH/KDK.4.2/III/2000,Hlm 2.

²⁴ Wawancara Dengan Bapak Syamsir dengan Nomor Anggotanya TR.11.00634 Tempat Tanggal Lahir Sungai Mempura,03-07-1961 Beralamat Di Koto Gasip ,alasan beliau menjual lahan kebun kelapa sawit kkpa tersebut dikarenakan adanya kebutuhan ekonomi yang meningkat sehingga bapak syamsir menjual perkebunan kelapa sawit kkpa miliknya,Hari kamis, Tanggal 10 oktober 2018 Bertempat Di Koto gasip.

²⁵ Wawancara Dengan Ibuk Alismar selaku pembeli lahan milik anggota KKPA milik dari Bapak Syamsir dengan Nomor Anggotanya TR.11.00634 Tempat Tanggal Lahir Sungai Mempura,03-07-1961 Beralamat Di Koto Gasip ,Hari Senin, Tanggal 24 Juli 2017 Bertempat Di Bangkinang Kota.

mempunyai hak dan mampu menjalankan haknya dan dijamin oleh hukum yang berlaku dalam hal itu menurut pasal 1 KUH Perdata menyatakan bahwa menikmati hak kewarganegaraan tidak tergantung pada hak kewarganegaraan.

2) Badan Hukum

Badan hukum (*rechts persoon*) merupakan badan-badan perkumpulan yakni orang-orang (*persoon*) yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia dengan demikian, badan hukum sebagai pembawa hak dan tidak berjiwa dapat melakukan sebagai pembawa hak manusia seperti dapat melakukan persetujuan-persetujuan dan memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota-anggotanya, oleh karena itu badan hukum dapat bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

b. Objek perjanjian

Objek dari perjanjian adalah adapun yang dijadikan objek jaminan dalam kredit koperasi primer anggota ini adalah lahan milik petani yang tergabung dalam koperasi rimba mutiara

Obyek hukum menurut pasal 499 KUH Perdata, yakni benda. Benda adalah segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik.

C. Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Inti Plasma KKPA antara Anggota dengan Koperasi Rimba Mutiara Kecamatan Koto Gasip Kabupaten Siak

1. Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Upaya dalam penyelesaian perselisihan yang dilakukan pihak koperasi rimba mutiara dengan anggota koperasi rimba mutiara sesuai dengan pasal 35 bab xv²⁶

- a. Setiap perselisihan yang timbul dalam penyelenggaraan koperasi di selesaikan dengan cara interen melalui musyawarah pengurus dan rapat anggota.
- b. Apabila tidak dapat diselesaikan menurut ketentuan (1) maka penyelesaiannya oleh anggota dapat diminta bantuan pejabat koperasi atas persetujuan rapat anggota.
- c. Selanjutnya atas perselisihan yang tidak dapat di selesaikan secara musyawarah dan mufakat sesuai Ayat (1) dan (2) diselesaikan menurut ketentuan rapat anggota.

Sanksi bagi anggota yang menjual lahan kebun miliknya kepada pihak lain, beliau mengataka sesuai dengan kesepakatan hasil rapat anggaran tahunan dalam rapat tersebut dijelaskan hak keanggotaannya dapat dicabut atau diperbolehkan dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang memperbolehkannya dengan syarat yang telah disepakati.

Kesepakatan yang harus dipenuhi oleh anggota atau para pihak dalam perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua dan diketahui dan disaksikan oleh pihak koperasi setelah itu pihak koperasi terlebih dahulu mengetahui alasan-alasan kenapa anggota menjual lahan kebun kkpA tersebut kemudian memberikan

2. Upaya Penyelesaian dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap anggota koperasi.

Upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pihak koperasi antara lain :²⁷

- a. Pihak kedua menyerahkan sejumlah uang kepada pihak Pertama;
- b. Pihak pertama sudah Menerima sejumlah uang pihak kedua dan menjual lahan KKPA dan menyerah

²⁷ wawancara dengan bapak manan selaku staf ARSIP dikoperasi rimba mutiara beliau menjelaskan tentang Pembagian lahan kebun kelapa sawit KKPA, Beralamat Di Koto Gasip ,Hari Senin, Tanggal 12 April 2017 Bertempat Di kantor koperasi rimba mutiara.

²⁶ *ibid*, Hlm, 20.

- kan kepemilikan lahan tersebut kepada pihak Kedua;
- c. Pihak pertama akan tetap bertanggung jawab atas segala penyelesaian administrasi baik di awal penjualan maupun di kemudian hari jika dibutuhkan oleh pihak kedua atau pihak koperas Rimba Mutiara;
 - d. Pihak pertama bertanggung jawab sepenuhnya apabila di kemudian hari terjadi permasalahan yang berkaitan dengan lahan tersebut;
 - e. Pihak pertama mengundurkan diri dari anggota Koperasi Rimba Mutiara yang di buktikan dengan surat pengunduran diri dan menyerahkan:
 - 1) Kartu tanda Anggota Koperasi Rimba Mutiara;
 - 2) Buku Rekening KKPA (Bank BRI);
 - 3) ATM Rekening KKPA kepada pihak kedua.
 - f. Pihak pertama akan menyerahkan kepada pihak kedua berupa surat tanah/ sertifikat tanah/ lahan kebun KKPA jika sudah di serahkan oleh pihak Koperasi.
 - g. Pihak pertama dan pihak kedua sudah menyetujui isi dari perjanjian ini.

Bapak Muhammad Nazar sebagai sekretaris koperasi rimba mutiara, beliau menuturkan bahwa tidak adanya sanksi yang jelas mengatur bagi anggota yang menjual lahan yang telah di tetapkan Berdasarkan Keputusan Koperasi Rimba Mutiara Nomor:15/KOP-RM/TR//11 di dalam Memutuskan menetapkan bagian kedua: “kepada petani peserta yang telah ditetapkan, dilarang memperjual belikan lahan kebun kelapa sawit tersebut.

Hak keanggotaanya meski dapat dicabut sesuai dengan Pasal 34 Bab XIV namun pihak koperasi memberikan dispensasi yaitu lahan kkpa tersebut boleh diperjual belikan dengan alasan- alasan dan pihak koperasi mengecek kebenaran dari kebenaran hal yang dialami oleh anggotanya sehingga jika benar adanya maka pihak koperasi tidak dapat melarang atau mencegah jual beli tersebut.

sanksi pidana yang diberlakukan oleh pihak koperasi kepada anggota yang menjual lahan kebun kelapa sawit KKPA

tidak ada namun para pihak harus melampirkan keterangan kepada pihak koperasi bahwa lahan kebun kelapa sawit telah terjual dan melengkapi berkas persyaratan sesuai yang telah disepakati bersama.²⁸

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan keterangan pada Bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Mekanisme dan hambatan dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak dimulai dengan keputusan koperasi rimba mutiara nomor : 15/KOP-RM/TR/X/11 tentang penetapan nama petani peserta tahap 1/2 program pengembangan kebun kelapa sawit pola kkpa antara PT. KTU ASTRA dengan koperasi rimba mutiara dikecamatan koto Gasip kabupaten Siak. Dengan syarat keanggotaan sesuai dengan surat keputusan : nomor 572 /BH/KDK4,2/1,2/111 /2000 dalam BAB 1V Pasal 4 disebutkan syarat dapat diterima menjadi anggota koperasi Ini Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir kesediaan menjadi anggota koperasi rimba mutiara
 - b. Penduduk yang mempunyai mata pencaharian
 - c. Telah cukup umur untuk melakukan tindakan hukum dan mempunyai mata pencaharian
 - d. Telah menyetujui isi anggaran dasar
 - e. Telah membayar simpanan pokok sebagaimana diatur dalam anggaran dasar

hambatannya yaitu ketetapan (RAT) nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 memutuskan dalam bagian kedua yaitu Kepada Petani Peserta Yang Telah Ditetapkan, Dilarang Memperjual

²⁸ Menurut bapak Muhammad Nazar sebagai sekretaris koperasi rimba mutiara, beliau menuturkan bahwa tidak adanya sanksi yang jelas mengatur bagi anggota yang menjual lahan, Tanggal 12 April 2017 Bertempat Di kantor koperasi rimba mutiara.

Belikan Lahan Kebun Kelapa Sawit(KKPA) jual beli yang dilakukan oleh bapak syamsir dan ibuk alismar tentu menimbulkan suatu permasalahan, namun disini lain pihak koperasi memperbolehkan jual beli tersebut, dengan ketetapan yang disepakati oleh para pihak, dan perjanjian tersebut sah dan jual beli tersebut dapat dipertanggung jawabkan dan mengenai sanksinya hak-hak keanggotaannya dapat dicabut apabila jual beli tersebut tidak diketahui oleh pihak koperasi namun apabila terjadi persengketaan antara para pihak dikumpulkan dalam rapat anggaran tahunan guna membahas permasalahan yang ada dalam koperasi rimba mutiara.

2. Upaya penyelesaian dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama kemitraan inti plasma KKPA antara anggota dengan koperasi rimba mutiara kecamatan koto gasip dikabupaten siak tersebut adalah dengan musyawarah dimana musyawarah tersebut di jembatani oleh ketua koperasi yaitu bapak Syofian Akhmad selaku pihak yang berwenang untuk melakukan penyelesaian, dan sekretarisnya bapak Muhammad Nazar sedangkan para pihak yang bersengketa yaitu bapak syamsir pihak pertama dan pihak kedua ibuk alismar. Pelaksanaan musyawarah terjadi dikantor koperasi rimba mutiara yang mana musyawarah menghasilkan hal-hal yang menjadi keinginan para pihak sebagai berikut yaitu Adanya upaya untuk lebih memperhatikan anggota yang tidak menjalankan peraturan koperasi, kemudian Adanya pembaharuan terhadap peraturan (RAT) nomor 15/KOP-RM/TR/X/11 memutuskan dalam bagian kedua yaitu Kepada Petani Peserta Yang Telah Ditetapkan, Dilarang Memperjual Belikan Lahan Kebun Kelapa Sawit(KKPA)

B. Saran

Sebagai akhir dari pembahasan ini penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat yang nyata baik itu bagi pihak yang terkait maupun yang tidak terkait yaitu

1. Sebaiknya mekanisme dalam pemberian kredit pola kkpa ini hendaknya setiap anggota harus menjalankan isi dari

perjanjian yang telah disepakati bersama agar hambatan-hambatan yang terjadi dalam pola kkpa ini dapat diselesaikan, sehingga akan memperkecil terjadinya hambatan-hambatan yang tidak diinginkan, dan hendaknya pihak ketiga dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dengan adil dan bijaksana

2. Hendaknya upaya-upaya yang dilakukan oleh Koperasi rimba mutiara dapat mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi didalam pola kkpa tersebut dan apabila upaya-upaya yang dilakukan tidak mengurangi masalah yang terjadi dalam pola kkpa, maka koperasi rimba mutiara juga perlu mengadakan pertemuan langsung dengan pihak yang bersengketa dan memberikan keputusan yang tegas agar kebelakangannya tidak adanya anggota yang melakukan hal yang sama dikemudian hari dan Proses serta bentuk pelaksanaan musyawarah yang dilakukannya dilakukan didepan notaris dan didaftarkan dipengadilan sehingga hal ini membuat kesepakatan yang terjadi sebelumnya mempunyai kekuatan hukum yang begitu kuat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Akdon, 2005, *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian*, Dewa Ruchi: Bandung.
- Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers.)
- Lala M. Kolopaking, 2002, “ *Kemitraan dalam Pengembangan Usaha Ekonomi Skala Kecil/Gurem*”, (Makalah Lokakarya Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Melalui Sinergitas Pengembangan Kawasan, Jakarta.
- Munir Fuady, 2010, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Adiyta: Jakarta
- Akdon, 2005, *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian*, Dewa Ruchi: Bandung.

Nawawi Hadari, 2009, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press: Jakarta.

Rimsky K. Judisseno, 2005, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama)

R. Subekti, 1994, *Hukum Perjanjian*, Intermas; Jakarta.

Takdir Rahmadi, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Jurnal Hukum

Herlin Budiono, "Mengapa Perusahaan Wajib Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Terhadap Lingkungan". *Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang – Undangan Departemen Hukum Dan Hak Asasimania RI*, vol.6 no.2-juni 2009

Thomson Reuters Canada Limited.; Michael, Banking & Finance Law Review July, 2016 Article Michael Marina1 Copyright © 2016 by Marin jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALT ERDISP+I+A+REF&originating Doc>, pada tanggal 24 Agustus 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

See, e.g., Timothy W. Guinnaine, A Failed Institutional Transplant: Raiffeisen's Credit Cooperatives in Ireland, 1894-1914, 31 EXPLORATIONS ECON. HIS. 38 (1994) (describing the failed transplant of German credit cooperatives in Ireland). jurnal westlaw, diakses melalui <https://1.next.westlaw.=OHJUR+ALTERDISP +I+A+REF&originatingDoc>, pada tanggal 2 februari 2018 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Menteri Pertanian Pasal 1 angka 8 No.33/Permentan /OT. 140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan Melalui Program Revitalisasi Perkebunan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Pasal 26.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, Pasal 1 Ayat 8.